

# Pendayagunaan *Website* Desa Sebagai Media Inovasi Desa Di Desa Bernung Dan Desa Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung

**Simon Sumanjoyo Hutagalung<sup>1</sup>, Dedy Hermawan<sup>2</sup>, Nana Mulyana<sup>3</sup>.**

<sup>1</sup>Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

<sup>2</sup>Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

<sup>3</sup>Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

Email: [simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id](mailto:simon.sumanjoyo@fisip.unila.ac.id)

## *Abstrak*

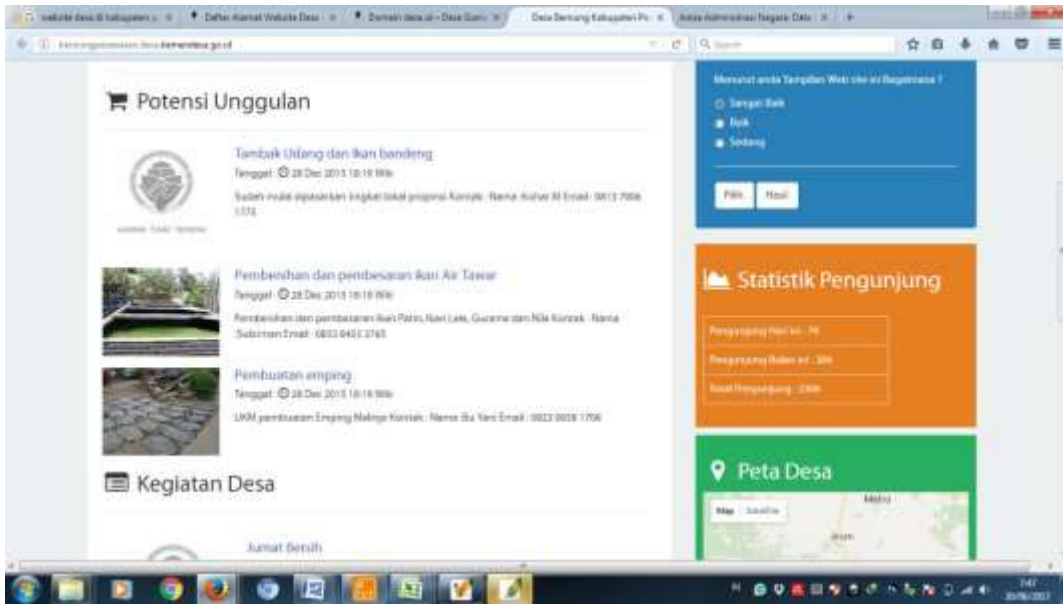
Permasalahan prioritas dalam pengelolaan website pemerintah desa adalah aspek mutu pengelolaan layanan dan pemanfaatannya sebagai media promosi pariwisata. Secara lebih spesifik kondisi tersebut terkait dengan dua aspek sebagai berikut; (1). Sumber daya manusia, khususnya dalam hal kapasitas dan kualitas aparatur desa serta pengelola website pemerintah desa, dan (2). Kelembagaan, khususnya dalam ketersediaan pedoman kerja dan perangkat evaluasi pengelolaan website pemerintah desa. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1). Peningkatan keterampilan SDM dalam pengelolaan website desa dan, (2). Peningkatan kuantitas dan kualitas pedoman kerja dan evaluasi pengelolaan website desa. Metode pelaksanaan yang dilakukan menggunakan prinsip bahwa setiap inovasi yang diterima oleh Mitra (1) dan Mitra (2) sebaiknya melalui proses, mendengar, mengetahui, mencoba, mengevaluasi, menerima, meyakini, dan melaksanakan. Pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa telah dipahaminya konsep pengelolaan Website desa, proses dan mekanisme pengelolaan pengelolaan Website desa serta pentingnya peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan Pengelolaan Website desa oleh para aparatur Desa di Desa Bernung dan Desa Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika telah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para Aparatur Desa dalam hal pengelolaan Website desa sebagai media inovasi desa .

***Kata Kunci: E Government, Inovasi Desa, Aparatur Desa, Pemerintah Desa***

## **Pendahuluan**

Dalam praktik pengembangan *website* dalam organisasi pemerintahan daerah Indonesia, tahapan perkembangan yang terjadi memang masih berbeda-beda. Ada daerah yang masih sangat ketinggalan dalam hal penggunaan teknologi informasi, bahkan ada yang hingga sekarang belum memiliki situs *website*. Pada kabupaten Pesawaran, diketahui dari 155 desa, hanya 12 desa yang telah memiliki *website* desa aktif, artinya hanya sekitar 7% desa yang mulai merintis *website* sebagai salah satu fasilitas pelayanan desa. Pada Desa Bernung (Mitra 1). Diketahui pengelolaan *website* desa yang masih mengalami stagnansi, konten tidak maksimal, kurang update dan tampilan kurang informatif. Hal ini terjadi dikarenakan pengelolaan sistem yang masih tergantung kepada tenaga ahli tertentu yang bekerja secara paruh waktu dan merangkap pekerjaan lainnya. Pengelolaannya bukan aparatur desa langsung, sehingga

implikasinya adalah tidak maksimal dalam pengelolaan. Mengenai kondisi tersebut bisa dilihat dari tampilan gambar 2 berikut:



Gambar 1. Website Desa Bernung (Mitra 1), Kabupaten Pesawaran

Pada desa lainnya, misalnya Desa Sumber Jaya (Mitra 2) bahkan tidak diketemukan suatu *website* yang representatif, padahal desa ini memiliki potensi pariwisata yang baik. Potensi tersebut berupa air terjun ciupang yang telah menarik wisatawan lokal maupun luar kota untuk singgah. Bisa dibayangkan jika potensi pariwisata ini diakomodasi melalui media *website* yang terkelola baik sehingga berimplikasi terhadap kualitas desa tersebut. Dalam wawancara pendahuluan dengan Bapak Sarya selaku Kepala Desa (28 Januari 2019), diketahui jika kondisi tersebut diakibatkan ketiadaan sumber daya manusia yang ahli dan juga belum dipahaminya konsep *website* secara utuh oleh pamong desa dan warga desa, sehingga masih muncul anggapan hal tersebut tidak diperlukan. Namun pihak desa merasa hal tersebut tetap diperlukan, mengingat desa saat ini harus mampu memaksimalkan potensinya sendiri dan *website* bisa menjadi alat guna tujuan tersebut.

Dapat kita pahami jika penerapan *website* dimaksudkan sebagai upaya aparatur pemerintah desa untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien (Indrajit, 2013). Salah satu contoh bentuk efisiensi dari penerapan *website* yakni penggunaan waktu yang lebih singkat dan terciptanya transaksi antara pemerintah dengan masyarakat dengan biaya yang lebih rendah. Konsep *website* yang diterapkan di Desa Hanura, Bernung (Mitra 1) dan Sumber Jaya (Mitra 2) tentunya bertujuan bahwa hubungan pemerintah baik dengan masyarakatnya maupun dengan pelaku bisnis dapat berlangsung secara efisien,

efektif dan ekonomis. Hal ini diperlukan mengingat dinamisnya gerak masyarakat pada saat ini, sehingga pemerintah harus dapat menyesuaikan fungsinya dalam negara, agar masyarakat dapat menikmati haknya dan menjalankan kewajibannya dengan nyaman dan aman, yang kesemuanya itu dapat dicapai dengan pembenahan sistem dari pemerintahan itu sendiri, dan *website* adalah salah satu caranya.

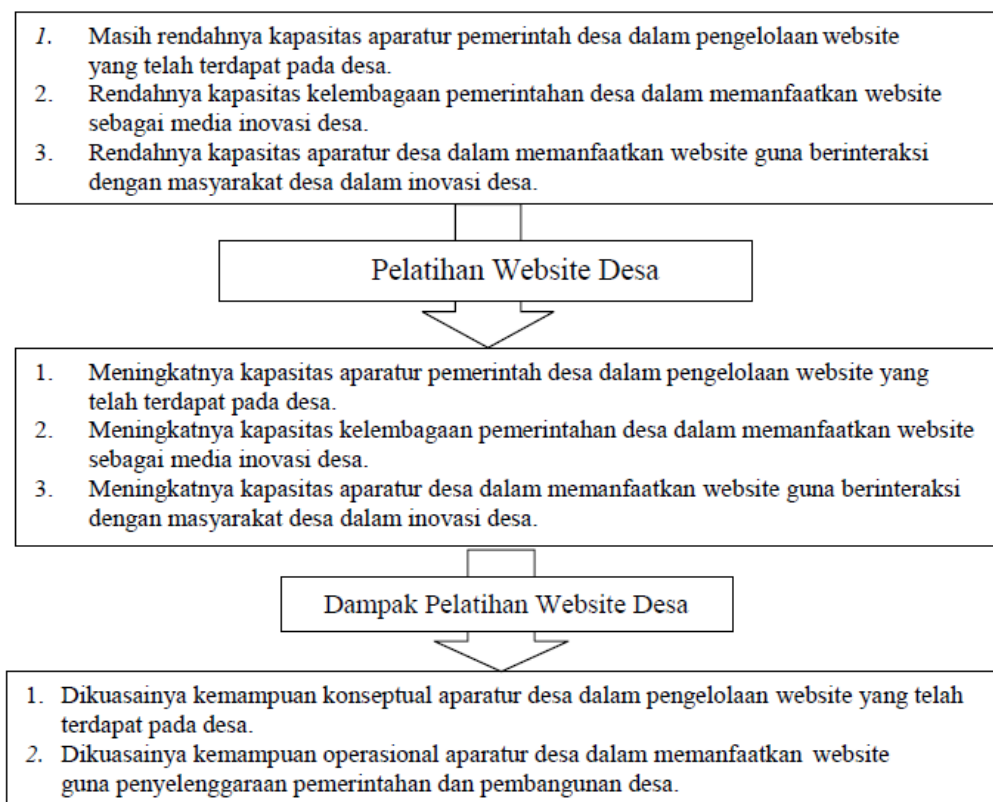
Persoalan utama yang dapat disimpulkan dari kondisi ketiga desa tersebut adalah persoalan kapasitas, dalam hal ini adalah kapasitas Sumber Daya Manusia, Sarana, Anggaran dan Kelembagaan. Kapasitas adalah adanya unsur kemampuan atau keberdayaan dari pemerintah setempat dalam mewujudkan *website* menjadi kenyataan. Menurut Sadikin (2011) dalam Indrajit (2013) ada tiga hal minimum yang paling tidak harus dimiliki oleh pemerintah sehubungan dengan elemen ini, yaitu: (1). Ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan berbagai inisiatif *website*, terutama yang berkaitan dengan sumber daya finansial, (2). Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai karena fasilitas ini merupakan 50% dari kunci keberhasilan penerapan konsep *website*; dan, (3). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan agar penerapan *website* dapat sesuai dengan asas manfaat yang diharapkan. Persoalan kapasitas merupakan persoalan fundamental saat berbicara tentang pemerintahan, termasuk adalah pelayanan masyarakat. Berkualitas atau tidaknya pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat akan ditentukan oleh aspek kapasitas yang dibangun oleh para *stakeholder*. Berawal dari identifikasi yang telah dilakukan, maka dirasakan perlu dilaksanakan kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas aparatur desa, pengelola dan masyarakat desa dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemanfaatan *website* yang sudah ada di desa mereka menjadi lebih memiliki nilai manfaat yang optimal.

Konsisten dengan identifikasi persoalan prioritas tersebut, kebutuhan mitra 1 dan mitra 2 guna mengatasi masalah tersebut berupa kegiatan pelatihan-pelatihan yang bersifat meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya serta ketersediaan perangkat kelembagaan, seperti program kerja dan Pedoman Kerja yang dapat menunjang efektifitas pengelolaan *website* pemerintah desa.

Tujuan dilakukan kegiatan pengabdian masyarakat melalui program ini adalah sebagai berikut: (a). Kegiatan ini dilakukan dalam rangka membangun media inovasi desa sehingga mampu menjadi penghantar bagi pengembangan potensi desa, (b). Meningkatkan kualitas pengelolaan *website* desa, sehingga menaikkan nilai informasi yang tersedia guna kemanfaatan potensi desa, (c). Memberikan solusi kepada kelompok masyarakat terhadap kendala lemahnya kapasitas pengelolaan *website* desa sebagai suatu media inovasi, (d). Dengan meningkatnya kapasitas pengelolaan *website* desa, sehingga diharapkan dapat membuka peluang-peluang sosial ekonomi masyarakat desa.

### Metode Pelaksanaan

Sebagai kelompok pelaksana intitusi, maka secara logis yang akan dilibatkan adalah Aparatur Pemerintah Desa yang terdapat di Desa Bernung dan Desa Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran. Diantaranya adalah para Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang terdapat tersebar di wilayah desa. Adapun target jumlahnya yaitu 35 orang peserta kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode Ceramah, Simulasi atau Praktek Kerja dan Diskusi Kasus. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pelatihan *Website* bagi pemerintah desa dengan materi yang mencakup aspek-aspek konseptual dan teknis dari *e-government*, sehingga diharapkan para aparatur desa yang ikut serta dalam kegiatan tersebut dapat memiliki kapasitas yang lebih baik. Selanjutnya kerangka tersebut dapat disederhanakan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pelaksanaan Kegiatan

Melihat cakupan dari kegiatan ini maka setidaknya hasil dari kegiatan ini juga akan dirasakan dampaknya kepada beberapa pihak-pihak yang memiliki keterkaitan, yaitu:

1. Pemerintahan Desa yang secara rutin akan mengelola *Website* desa.
2. Pemerintah Kecamatan sebagai pihak yang melaksanakan koordinasi kepada pemerintah desa dalam hal pengelolaan *Website* Desa.

Ada dua rancangan evaluasi yang akan digunakan untuk kegiatan ini, yaitu:

1. Evaluasi secara kuantitatif melalui *pre test* dan *post test*. Rancangan tersebut digunakan untuk mengukur perubahan pengetahuan dan kemampuan konsep seluruh peserta kegiatan.
2. Evaluasi secara kualitatif dilakukan melalui diskusi/ tanya jawab dengan pemantauan selama proses pemaparan materi yang disajikan berlangsung antara penyaji materi dengan peserta sosialisasi, khususnya yang terkait dengan aspek yang berhubungan dengan tema kegiatan.

### Hasil dan Pembahasan

Rangkaian kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam Pengelolaan *Websitedi* Desa Bernung dan Desa Sumber Jaya ini dimulai dengan pembukaan dan sambutan dari pihak Kepala Desa. Melalui sambutannya pihak Kepala Desa memberikan respek positif dengan adanya kegiatan yang dinisiasi oleh anggota Kepala Desa dan Tim Pengabdian Masyarakat FISIP Universitas Lampung ini.

Usai sambutan dari Kepala Desa dan Tim Pengabdian Pada Masyarakat, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian *post test* kepada seluruh peserta. Penyampaian *post test* dilakukan untuk mengetahui pengetahuan para peserta terhadap tema kegiatan yang hendak dilaksanakan. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi dari para pemateri yang sudah disusun sebelumnya. Penyampaian materi dilakukan secara panel dengan substansi penyampaian yang saling berkaitan. Berikut adalah susunan materi yang disampaikan;

**Tabel 1. Distribusi Materi dan Pemateri Kegiatan**

No	Materi	Pemateri	Sesi
1	Implementasi Kebijakan Pengelolaan <i>Website</i> di Desa	Simon S. Hutagalung, M.P.A	I
2	Arah Pengembangan dan Praktik Sistem Informasi Desa	Dr. Dedy Hermawan, M.Si	
3	Kolaborasi Pelaksanaan dan Pengembangan <i>Website</i> desa sebagai media inovasi desa	Nana Mulyana, S.I.P, M.Si	II

Pada materi pertama yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan *Websitedi* Desa” dikemukakan oleh Bapak Simon S. Hutagalung, M.P.A tentang latar munculnya perundang-undangan yang diperuntukan bagi desa. Selain itu diutarakan juga beberapa point penting tentang administrasi desa yang kemudian menjadi bagian dari substansi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. Setelah itu, secara paralel Bapak Dr. Dedy Hermawan, M.Si yang menyampaikan materi tentang “Arah Pengembangan dan Praktik Sistem Informasi Desa” memberikan identifikasi point penting tentang system informasi desa dan pengelolaannya di dalam peraturan tersebut yang juga harus disikapi oleh pemerintah desa dengan melakukan

pengembangan kapasitas aparatur, sehingga kemanfaatan dari kebijakan tersebut dapat secara nyata dirasakan oleh warga desa.



**Gambar 3. Salah Satu Sesi Kegiatan Pelatihan Kepada Operator Desa**

Pada sesi kedua, Bapak Nana Mulyana, S.I.P, M.Si menyampaikan tentang “Kolaborasi Pelaksanaan dan Pengembangan *Website* desa sebagai media inovasi desa”, beliau memberikan identifikasi hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan *Website* desa sebagai media inovasi desa. Potensi positif yang dimunculkan dari UU No 6 Tahun 2014 diantaranya adalah anggaran yang diberikan kepada desa akan semakin besar, oleh karena itu anggaran yang besar itu perlu di wujudkan kedalam program-program yang dapat menggerakkan kehidupan sosial ekonomi desa nantinya, termasuk dalam hal pengelolaan *website* desa.

Setelah seluruh pemateri menyampaikan materinya, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab/diskusi yang dilakukan secara terpandu. Tanya jawab/diskusi berlangsung secara aktif dan antusias. Hampir sebagian besar peserta kegiatan menyampaikan pertanyaan atau meminta penjelasan lebih mendalam tentang topik *Website* desa sebagai media inovasi desa, termasuk dalam kaitan dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa berdasarkan pengalaman dan permasalahan yang sudah pernah mereka rasakan.

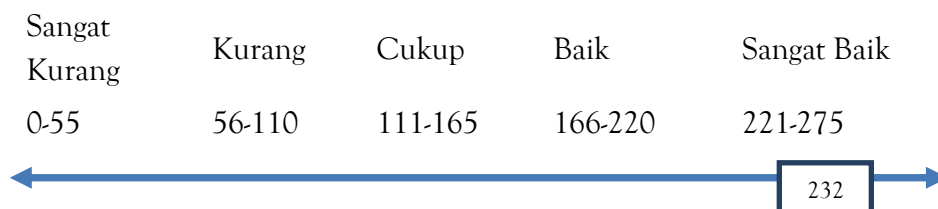
Setelah sesi tanya jawab/diskusi dilaksanakan dan dianggap telah cukup memuaskan para peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian post test kepada peserta. Post test dapat dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. Post Test ini bermanfaat untuk melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan. Pada akhirnya setelah post test selesai dilaksanakan, maka kegiatan ditutup oleh Koordinator Kepala Desa dan Koordinator Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat. Dari pengamatan dan analisis skoring serta secara kualitatif maka dapat dikatakan bahwa telah lebih dikuasainya pengetahuan tentang Pengelolaan *Website* desa sebagai media inovasi desa oleh para anggota Aparatur Desa.

Setelah kegiatan tutorial dilakukan pada kedua sesi, dilaksanakan juga penilaian observasi terhadap keterampilan para peserta. Penilaian ini dilakukan guna mengetahui perkembangan keterampilan yang dimiliki oleh para sekretaris desa. Rekapitulasi penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Rekapitulasi Penilaian Observasi Keterampilan Aparatur Desa**

No	Proses	Hasil				
		5	4	3	2	1
	<b>Sikap yang dinilai:</b>	SB	B	C	K	SK
1	Persiapan alat dan bahan	8	2	1		
2	Motivasi untuk melaksanakan E-Gov	8	1	2		
3	Kedisiplinan updating konten	7	2	2		
4	Ketepatan dalam penulisan data	7	2	2		
5	Pengecekan data dokumen	8	2	1		
	Jumlah Centang	38	9	2	0	0
	Nilai	5	4	3	2	1
	Jumlah x nilai	190	36	6	0	0
	Nilai Total					232

Diketahui bahwa nilai total minimum dihasilkan dari jumlah pertanyaan dikali nilai terendah dikali jumlah responden sehingga diperoleh angka 55 sementara nilai total maksimum diperoleh dari jumlah pertanyaan dikali nilai tertinggi dikali jumlah responden sehingga diperoleh angka 275. Kemudian rentang angka 55 hingga 275 disusun menjadi lima kategori penilaian. Kategorisasi ini nantinya dapat menunjukkan posisi nilai total yang sudah diperoleh dari penilaian observasi kepada para sekretaris desa secara rata-rata. Sehingga apabila dikategorisasi berdasar 5 kriteria maka didapatkan posisi nilai total 232 berada pada kategorisasi sangat baik. Berikut adalah ilustrasi dari posisi nilai tersebut.



**Gambar 4. Hasil Kategorisasi Penilaian Observasi**

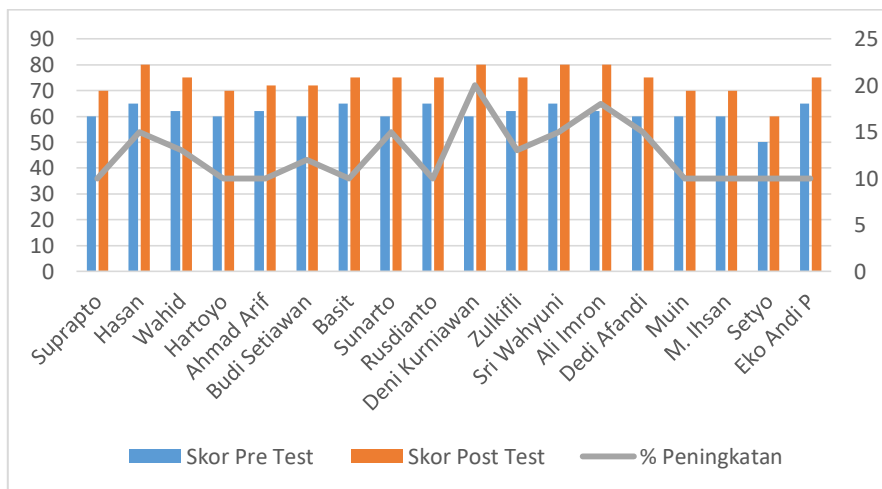
Selain itu, setelah sesi tanya jawab/diskusi dilaksanakan dan dianggap telah cukup memuaskan para peserta kegiatan maka acara dilanjutkan dengan pemberian *post test* kepada

peserta. *Post test* dapat dilaksanakan secara lancar dan dijalankan dengan penuh antusias. *Post Test* ini bermanfaat untuk melihat perubahan pengetahuan yang terjadi pada peserta kegiatan. Berikut adalah daftar skoring yang membandingkan antara *pre test* dan *pro test* yang terbagi kedalam dua sesi materi, pada sesi pertama yaitu tentang administrasi asset dan kekayaan desa didapatkan grafik peningkatan yang secara rerata menunjukkan angka 10,89%. Distribusi nilai tersebut dapat dilihat dari gambar berikut;



Gambar 5. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi 1

Sementara itu, pada sesi implementasi system informasi desa terjadi juga peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tertinggi berada pada angka 20% dan peningkatan terendah pada angka 10%, sementara secara rerata peningkatan terjadi pada angka 12,56%. Sebaran angka tersebut dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 6. Distribusi Nilai Pre Test dan Post Test Sesi 2



Dari pengamatan dan analisis data maka dapat dikatakan bahwa telah meningkatnya penguasaan pengetahuan tentang kolaborasi *Website* desa sebagai media inovasi desa oleh para aparatur desa yang mengikuti kegiatan tersebut. Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui juga adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu. Faktor pendukung itu adalah adanya gairah dan ekspektasi dari para peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, memudahkan pemateri untuk melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing mereka.

Dari pelaksanaan kegiatan tersebut, dapat diketahui adanya beberapa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat itu. Faktor pendukung itu adalah adanya gairah dan ekspektasi dari para peserta kegiatan untuk mengikuti kegiatan itu. Sehingga adanya minat tersebut, memudahkan pemateri untuk melakukan pengembangan kapasitas pengetahuan pada masing-masing mereka.

Selain itu, diketahui juga adanya faktor penghambat yang perlu diantisipasi jika hendak melaksanakan kegiatan serupa pada masa yang akan datang. Diantaranya adalah belum dapat dilaksanakannya kegiatan yang lebih teknis dalam bentuk tutorial kepada para peserta. Adanya kegiatan tutorial yang lebih teknis sebenarnya dapat lebih mampu meningkatkan kemampuan praktis yang semestinya memang dimiliki oleh para aparatur desa.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan analisis terhadap kegiatan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa telah dipahaminya konsep pengelolaan *Website* desa sebagai media inovasi desa, proses dan mekanisme pengelolaan *Website* desa sebagai media inovasi desa serta pentingnya peran aktif aparatur desa dalam pengelolaan *Website* desa sebagai media inovasi desa oleh para aparatur Desa di Desa Bernung dan Sumber Jaya Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan jika telah meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para Aparatur Desa dalam hal pengelolaan *Website* desa sebagai media inovasi desa.

Adapun saran yang bisa diperoleh berdasarkan hasil dari kegiatan ini adalah:

- a. Perlu dilakukan kegiatan pelatihan yang lebih bersifat teknis operasional serta lebih mendalam, sehingga aspek-aspek teknis yang bersifat operasional dapat dikuasainya secara lebih menyeluruh menjadi bentuk kapasitas-kapasitas yang diperlukan dalam pengelolaan layanan administrasi desa.
- b. Kegiatan seperti ini perlu dilakukan pada target sasaran yang lebih luas lagi, meliputi kecamatan lain ataupun kabupaten lainnya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Ketua LPPM Unila atas didanainya Pengabdian Pada Masyarakat ini melalui skema Unggulan Perguruan Tinggi tahun 2019. Terima kasih juga kami ucapkan kepada para Kepala Desa di Bernung dan Sumber Jaya yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Dwipayana, AAGN, Ari, dkk. 2003. Membangun *Good governance* di Desa, Yogyakarta: IRE.
- Guntur Setiawan, 2004, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Harsono, Hanifah. 2002 Implementasi Kebjagn dan Politik. Bandung: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis. Yogyakarta: Gava Media.
- Indrajit, Richardus Eko. 2003. *Electronic Government* (Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital). eBook.
- Indrajit, Richardus Eko. 2007. *Electronic Government In Action* (Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia). eBook.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2010. Kegagalan Penerapan *Websitedan* Kegiatan Tidak Produktif Dengan Internet. Yogyakarta.
- Lexy J. Moleong. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda karya Offset
- Nawawi, Ismail, 2009. Public Policy : Surabaya : PNM
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan public, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan *Good governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama
- Sedarmayanti. 2007. *Good governance* (Kepemerintahan Yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik) Bagian Ketiga. Bandung : Mandar Maju
- Sedarmayanti, 2009, Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan, Bandung: PT Refika Aditama
- Setiawan, Guntur. 2004 Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Syahriani, 2009. Implementasi Otonomi daerah dalam Perspektif *Good governance*. Yogyakarta: Putaka Pelajar

#### Peraturan Perundang-undangan :

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan  
dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Permenkominfo No.05 Tahun 2015 tentang pembuatan domain desa.id